

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan Penelitian

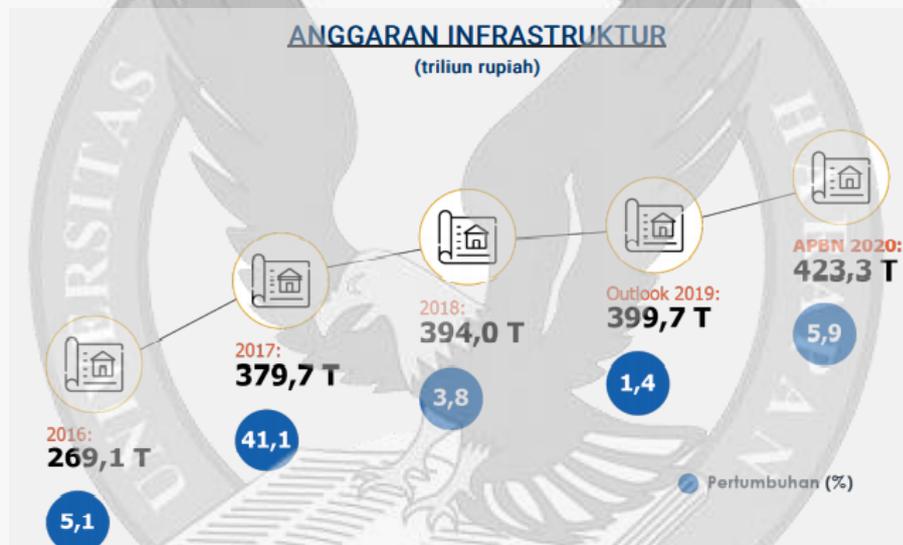
Kerusakan dini atau kegagalan pada pelaksanaan konstruksi di Daerah Provinsi Banten, disebabkan karena implementasi standarisasi dokumen sehingga kinerja mutu tidak dapat tercapai, baik dalam pemilihan pengadaan jasa konstruksi maupun dalam pelaksanaan konstruksi di Daerah Provinsi Banten. Standardisasi merupakan proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak sedangkan Standar adalah dokumen yang berisikan spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat - syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya sehingga tercapainya kinerja mutu yang diharapkan PP.No.102 Thn 2000.

Kegagalan dalam penerapan standarisasi dalam pelaksanaan pemilihan pengadaan jasa konstruksi yang mengakibatkan standar mutu dalam pelaksanaan jasa konstruksi di daerah Provinsi Banten yang tidak sesuai dengan standar kinerja mutu. Pengertian mutu itu sendiri merupakan keseluruhan ciri atau karakteristik produk, jasa dalam tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan atau kesesuaian untuk digunakan, seperti yang dinilai oleh pengguna (Joseph M. Juran) Pada hakikatnya beberapa pengertian mutu tersebut adalah sama dan memiliki elemen-elemen meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan, mencakup produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan, merupakan kondisi yang selalu berubah.

Pengawas lapangan tidak cermat dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dan permasalahan. Pelaksanaan suatu proyek pembangunan yang lancar dan tanpa kendala serta memenuhi lima kriteria suatu proyek yang baik yaitu tepat waktu, tepat mutu, tepat metode, tepat biaya dan ramah lingkungan, tentunya merupakan hal yang diharapkan oleh semua pihak yang terlibat dalam

proyek. Kurangnya sumber daya dalam pengawasan dilakukan untuk mengawasi pelaksanaan dari pekerjaan agar sesuai dengan standar dokumen kontrak dan spesifikasi teknis sedangkan pengendalian dilakukan agar kinerja mutu dan waktu proyek sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pemerintah setiap tahun mengalokasikan dana untuk pembangunan gedung dan infrastruktur di seluruh Indonesia baik dengan menggunakan Anggaran Pembelajaran Daerah (APBD) maupun Anggaran Pembelajaran Nasional (APBN), dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan terlihat dari Gambar 1.1 dan peningkatan anggaran, yang juga seharusnya berbanding lurus dengan penyerapan dan pelaksanaan dengan hasil dan mutu yang baik untuk dapat dipergunakan sesuai dengan fungsi dan umur dari konstruksi tersebut.



Gambar : 1. 1 Grafik Pertumbuhan dan APBN tahun 2016 – 2020

Anggaran Infrastruktur dan pengadaan Jasa

Sebagaimana pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan Makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional.

Demikian pula halnya dengan pembangunan di Provinsi Banten penganggaran dan pertumbuhan setiap tahun meningkat pada umumnya, tetapi ada penurunan kinerja mutu baik dalam proses pengadaan ataupun dalam tahap konstruksi yang semestinya masih masuk di fase perawatan, tetapi sudah mengalami kerusakan seperti data proyek mangkrak (Difa,2020, Proyek Sport Center Kota Cilegon Mangkrak, Redaksi24.com <https://www.redaksi24.com/sudah-sedot-rp200-miliar-proyek-sport-center-kota-cilegon-mangkrak/>), (BantenNews.co.id,2021,Standar Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi pembangunan 8 Lantai RSUD Prov. Banten proses lelang melalui Penyedia ada kejanggalan) dan data LPSE Provinsi banten proses pengadaan barang dan jasa .

Tabel 1.1 Data Tender LPSE Provinsi Banten

Data Primer - LPSE Pengadaan Barang Dan Jasa Provinsi Banten																
INFORMASI TENDER JASA KONSTRUKSI LPSE - PROVINSI BANTEN																
TAHUN 2015 - 2020																
No.	Nama Tender	Satuan Kerja	Thn/APBD	Peserta Tender	Evaluasi Dokumen	Deviasi	Bobot % Kesiapan Peserta Tender	Nilai Kontrak	Keterangan							Alamat Peserta Pemenang
									K	B	A	T	H	P	PK	
1	Pembangunan Jalan Pakupatan – Palima thn 2015	DBMTR Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan	2015	116	3	113	0.03	Rp 259.200.000.000,00	3	3	1	1	1	1	DKI Jakarta	
2	Pembangunan Jalan Citeureup - Tj. Lesang – Sumur APBD 2015	DBMTR Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan	2015	153	24	129	0.16	Rp 13.413.611.640,00	1	24	2	1	1	1	DKI Jakarta	
3	Pembangunan Jembatan Kedaung Lanjutan thn 2016	Dinasa Bina Marga dan Tataruang Prov. Banten	2016	178	14	164	0.08	Rp 32.550.000.000,00	1	14	1	1	1	1	DKI Jakarta	
4	pembangunan gedung ruang rawat inap (Evaluasi Ulang) thn 2016	RSU Prov. Banten	2016	111	5	106	0.05	Rp 20.873.540.000,00	1	5	4	4	1	1	Prov. Banten	
5	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten thn 2017.	Dinasa Bina Marga dan Tataruang Prov. Banten	2017	111	3	108	0.03	Rp 50.091.200.000,00	3	1	1	1	1	1	DKI Jakarta	
6	Pembangunan Jalan Wilayah Selatan Ruas Jalan Picung – Manjul thn 2017.	Dinasa Bina Marga dan Tataruang Prov. Banten	2017	168	9	159	0.05	Rp 42.700.000.000,00	1	8	1	1	1	1	DKI Jakarta	
7	Pembangunan Jalan Ruas Jalan Palima - Pasang Teneng (Sta 38+700 s/d 40+700) Evaluasi Ulang thn 2018.	Dinasa Bina Marga dan Tataruang Prov. Banten	2018	78	1	77	0.01	Rp 26.983.926.000,00	1	1	1	1	1	1	DKI Jakarta	
8	Penataan Banten Lama thn 2018	Perkim Prov. Banten	2018	94	5	89	0.05	Rp 71.979.000.000,00	5	2	1	1	1	1	Banda Aceh	
9	Pembangunan Jalan Cipanas - Warung Banten APBD 2018/2019.	Dinasa Bina Marga dan Tataruang Prov. Banten	2019	109	3	106	0.03	Rp 81.250.000.000,00	3	1	2	1	1	1	Kalim	
10	Pembangunan Gedung OPD dan Infrastruktur Dasar APBD 2019.	Perkim Prov. Banten	2019	79	1	78	0.01	Rp 109.781.225.700,00	1	1	1	1	1	1	Jawa Barat	
11	Penataan Banten Lama (Tahap II) APBD 2019	Perkim Prov. Banten	2019	59	2	57	0.03	Rp 20.000.000.000,00	1	1	1	2	1	1	Subel	
12	Pembangunan Stadion di Kawasan Sport Centre (Multiyears) APBD 2020/2021.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	2020	123	3	120	0.02	Rp 983.000.000.000,00	1	3	3	1	1	1	DKI Jakarta	
13	Pemeliharaan Berkala Jalan dan Rehabilitasi Jembatan Provinsi Wilayah Tangerang. APBD 2020.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tataruang	2020	135	3	132	0.02	Rp 26.000.000.000,00	3	1	3	1	1	1	Jawa Barat	
14	Pembangunan Rumah Sakit Jiwa Tahap II APB	Dinkes Prov. Banten	2020	126	3	123	0.02	Rp 38.162.861.000,00	3	3	3	3	3	1	Prov. Banten	
				100%			0.60									
							4.27%									
							95.73%									
Ket :																
K : Evaluasi Kualifikasi, B : Pembuktian Kualifikasi, A : Evaluasi Administrasi, T : Evaluasi Teknis, H : Evaluasi Harga, P : Permenang, PK : Pemenang Kontrak																

Dari data LPSE Provinsi Banten diatas didapatkan angka 95,73 % yang merupakan nilai persentase peserta tender tidak dapat memenuhi standar dokumen pengadaan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Nilai yang didapatkan dari data tersebut hanya 4,27 % yang dapat memenuhi standar dokumen pengadaan, itupun hanya diwakili oleh satu peserta lelang yang memenuhi standar dokumen dari 14 proyek yang ditenderkan. Artinya standar dokumen masih rendah untuk dimengerti oleh kontraktor diwilayah daerah Provinsi Banten.

Dari uraian Difa 2020, Banten News.co.id 2021 dan Tabel 1.1. tender Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang menjadi latar belakang untuk melakukan penelitian apa yang menjadi faktor penyebab kegagalan mulai dari inisiasi, perencanaan, pemilihan pengadaan, pelaksanaan dan serah terima, kesesuaian standar dokumen untuk mencapai kinerja mutu.

1.2 Permasalahan Penelitian

Penelitian ini menganalisa masalah pengaruh implementasi standarisasi dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi dalam pelaksanaan jasa konstruksi. Mengidentifikasi apa saja faktor dan variabel penting yang mempengaruhi dalam pemilihan Jasa Konstruksi Terhadap Kinerja Mutu di Daerah Provinsi Banten. maka rumusan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Apa saja standarisasi dokumen pengadaan jasa konstruksi dalam pelaksanaan jasa konstruksi di daerah Provinsi Banten ?
2. Apa saja faktor-faktor dan Variabel standar mutu yang digunakan dalam proses pengadaan Jasa Konstruksi ditinjau dari sistem manajemen mutu ?
3. Seberapa besar penerapan faktor – faktor sistem manajemen mutu dalam proses pengadaan Jasa Konstruksi di Daerah Provinsi Banten ?
4. Bagaimana rekomendasi dari Faktor standarisasi dokumen pengadaan jasa konstruksi terhadap kinerja mutu dalam pelaksanaan Jasa Konstruksi di Daerah Provinsi Banten ?

1.3 Batasan Permasalahan Penelitian

Agar penulisan ini tidak menyimpang dari tujuan yang dimaksud, maka masalah penelitian ini dibatasi pada :

1. Pengaruh *standardisasi dokumen untuk pengadaan jasa konstruksi* di Daerah Provinsi Banten.
2. Faktor-faktor standar mutu yang digunakan dalam proses pengadaan Jasa Konstruksi ditinjau dari sistem manajemen mutu.
3. Penerapan Faktor – faktor sistem manajemen mutu dalam proses pengadaan Jasa Konstruksi di Daerah Provinsi Banten.
4. Variabel penelitian yang mempengaruhi standarisasi dokumen untuk pengadaan jasa konstruksi di Daerah Provinsi Banten.

1.4 Tujuan Penelitian

Dari hasil penelitian ini akan didapatkan kesimpulan dan rekomendasi antara lain :

1. Mengetahui Pengaruh standarisasi dokumen pengadaan jasa konstruksi dalam pelaksanaan jasa konstruksi di daerah Provinsi Banten.
2. Mengidentifikasi faktor – faktor dan variabel penting yang mempengaruhi dalam pemilihan pengadaan Jasa Konstruksi Terhadap Kinerja Mutu di Daerah Provinsi Banten.
3. Mengetahui seberapa besar penerapan Faktor – faktor sistem manajemen mutu dalam proses pengadaan Jasa Konstruksi di Daerah Provinsi Banten.
4. Memberikan rekomendasi dari faktor-faktor yang mempengaruhi Faktor standarisasi dokumen pengadaan jasa konstruksi terhadap kinerja mutu dalam pelaksanaan Jasa Konstruksi di daerah Provinsi Banten.

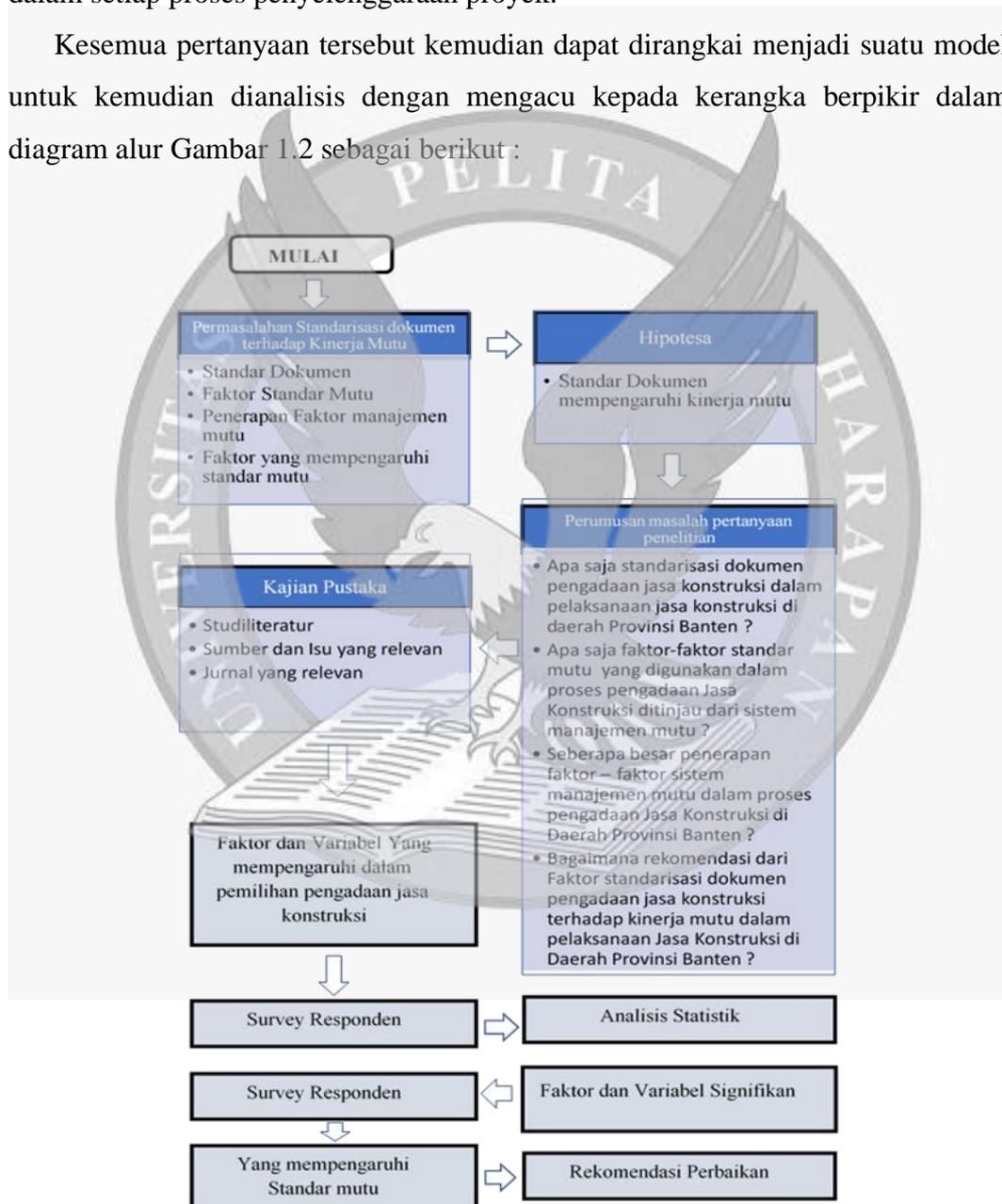
1.5 Kerangka Pemikiran

Sebelum dilakukannya proses penelitian, maka perlu ditentukan kerangka berpikir agar proses penelitian dapat dilakukan dengan sistematis. Kerangka berpikir dimulai dari latar belakang permasalahan apa yang menjadi topik penulisan untuk diteliti lebih lanjut. Permasalahan dalam hal ini adalah merupakan fakta atau kejadian, yaitu " Faktor dan variabel standar dokumen untuk mencapai kinerja

mutu " yang merupakan suatu kejadian nyata dan terukur dan dapat memberi dampak terhadap hasil akhir ataupun pencapaian standar mutu dari suatu proyek.

Kemudian dari latar belakang tersebut diatas, diuraikan menjadi beberapa perurnusan masalah, yang berangkat dari beberapa pertanyaan atas hal apa saja faktor dan variabel yang mempengaruhi peristiwa tersebut, yaitu dari sisi faktor dan variabel standar dokumen, penyebab timbulnya kerusakan dini, dan kegagalan dalam setiap proses penyelenggaraan proyek.

Kesemua pertanyaan tersebut kemudian dapat dirangkai menjadi suatu model untuk kemudian dianalisis dengan mengacu kepada kerangka berpikir dalam diagram alur Gambar 1.2 sebagai berikut :



Gambar. 1. 2 Diagram Alur Kerangka Berpikir

1.6 Sistematika Penelitian

Proses penelitian ini disusun dalam beberapa tahap dan bagian sesuai dengan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 BAB. Setiap BAB akan menjelaskan uraian atau analisis dan pembahasan mengenai penelitian yang akan dikelompokkan menjadi sub bab. Berikut sistematika penulisan dalam penelitian ini antara lain :

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang dilakukannya penelitian ini. Bagian ini terdiri dari rumusan permasalahan penelitian, batasan penelitian, tujuan dan manfaat yang ingin dicapai serta kerangka pemikiran yang menjadi landasan penelitian ini, dijelaskan data – data yang menjadi dasar dari permasalahan penelitian ini.

Bab II : Kajian Pustaka

Pada bagian ini dijelaskan mengenai landasan teori yang terkait dengan standarisasi dokumen pengadaan jasa konstruksi dalam pelaksanaan jasa konstruksi di daerah Provinsi Banten pendahuluan secara umum dan secara khusus. Sumber literatur diambil dari beberapa referensi baik berupa buku maupun jurnal penelitian yang telah diterbitkan.

Bab III : Metodologi Penelitian

Pada bagian ini dijelaskan metode dan prosedur yang digunakan dalam penelitian ini. Sistematika penelitian digambarkan melalui bagan alur yang menjelaskan setiap langkah yang dilalui. Dasar dari langkah-langkah penelitian secara kualitatif dan sistem pengumpulan data dijelaskan dalam bagian ini.

Bab IV : Analisis dan Pembahasan

Analisa terhadap data-data yang diperoleh dan pembahasannya, sampai diambil suatu kesimpulan dijabarkan dalam bagian ini. Setiap langkah analisis yang digunakan dan pembahasan yang terkait dengan hasil temuan yang dihasilkan

dijelaskan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai hasil yang diperoleh dari penelitian.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Bagian ini berisi kesimpulan-kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian yang dilakukan. Saran-saran yang sekiranya dapat digunakan serta rekomendasi lanjutan yang dapat dipakai pada pengembangan penelitian berikutnya.

